



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SUSANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 893258

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.680.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/500 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/171 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 913 m2/913 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2854 m2/200 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 2714 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.765.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI SANTA V SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. MOBIL, FORTUNER JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, GRAND VITARA JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



5. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER HARTOP JEEP Tahun 1981,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 260.659.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 157.108.975

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.862.768.475

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.862.768.475

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.